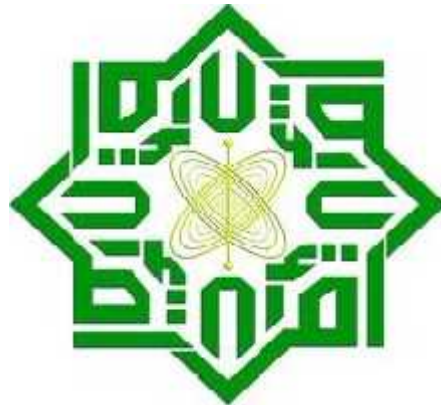


SKRIPSI

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SUKU AKIT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA HUTAN PANJANG KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Disusun Oleh

Rika Karmila
NIM.10975008237

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKAN BARU
RIA
2013**

ABSTRAK

Partisipasi Politik Masyarakat Suku Akit Dalam Pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

Oleh:

Rika Karmila
NIM.10975008237

Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Hutan Panjang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat partisipasi politik masyarakat suku akit dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Hutan Panjang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara random sampling (acak bebas) karena jumlah populasi pada penelitian ini cukup banyak yaitu 343 orang, maka peneliti menetapkan sampelnya 10% dengan menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan 77 orang sampel sebagai responden dalam penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan questioner. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif yaitu dalam bentuk tabel-tabel dengan melihat jawaban responden terhadap partisipasi politik masyarakat suku akit dalam pemilihan Kepala Desa dalam bentuk persentase dan data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat suku akit dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 dapat dikatakan kurang baik. Dimana masyarakat tidak mempunyai kesadaran sendiri untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa .

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Partisipasi	12
2.2 Partisipasi Politik	16
2.2.1 Sifat-sifat Partisipasi Politik	19
2.2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	19
2.2.3 Fungsi-fungsi Partisipasi Politik	20
2.2.4 Sebab-sebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik .	21
2.2.5 Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Politik	21
2.3 Masyarakat	23
2.4 Demokrasi	24
2.5 Pemilihan Kepala Desa	27
2.5.1 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (pasal 2)	30
2.5.2 Pendaftaran Pemilih (pasal 3)	30
2.5.3 Pencalonan Kepala Desa (pasal 5)	30
2.5.4 Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa (pasal 13)	32
2.5.5 Pemungutan Suara (pasal 15)	33
2.5.6 Penghitungan Suara (pasal 22)	33
2.6. Cara Memilih Pemimpin Menurut Islam.	34

2.7 Penelitian Pendahuluan.....	36
2.8 Konsep Operasional.....	38
2.9 Hipotesis	41
2.10 Teknik Pengukuran	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	42
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	42
3.2.1 Subjek Penelitian.....	42
3.2.2 Objek Penelitian.....	43
3.3 Sumber Data	43
3.3.1 Data Primer	43
3.3.2 Data Sekunder.....	44
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian.....	44
3.4.1 Populasi.....	44
3.4.2 Sampel.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5.1 Angket (Questioner).....	46
3.5.2 Wawancara (interview).....	46
3.6 Analisa Data.....	47
3.6.1 Jenis Penelitian.....	47
3.6.2 Rumus Statistik	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1 Sejarah dan Geografis Desa Hutan Panjang	49
4.1.2 Penduduk Desa Hutan Panjang	54
4.1.3 Agama Masyarakat Desa Hutan Panjang	55
4.1.4 Pendidikan Masyarakat Desa Hutan Panjang.....	56
4.1.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Hutan Panjang	57
4.1.6 Sosial Budaya	60
4.2 Pemerintah Desa	61
4.2.1 Struktur Pemerintah Desa Hutan Panjang	62

4.2.2	Visi dan Misi Desa Hutan Panjang	65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
5.1	Identitas Responden	67
5.1.1	Jenis Kelamin Responden	67
5.1.2	Umur Responden	68
5.1.3	Tingkat Pendidikan	69
5.1.4	Pekerjaan Responden	71
5.2	Partisipasi Masyarakat Suku Akit Dalam Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	72
5.2.1	Partisipasi Masyarakat dalam Pemberian Suara	73
5.2.2	Partisipasi Masyarakat dalam Suatu Diskusi Politik Pencalonan Kepala Desa	78
5.2.3	Partisipasin dalam Kampanye	80
5.2.4	Partisipasi Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan	84
5.2.5	Partisipasi dalam Komunikasi Individual Dengan Pejabat Politik dan Administratif Jenis Kelamin Responden	86
BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	97
6.2	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Suku Akit yang Terdaftar di Desa Hutan Panjang ..	4
Tabel I.2	Kesadaran Penduduk yang Terdaftar di DPT dalam Pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang 2010	6
Tabel I.3	Persentase Masyarakat yang Tidak Memilih dalam Pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert..	7
Tabel 2.1	Konsep Operasional Penelitian.....	40
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Hutan Panjang Berdasarkan Umur	54
Tabel 4.3	Jumlah Masyarakat Desa Hutan Panjang Berdasarkan Agama yang Mereka Anut.....	56
Tabel 4.4	Jenis Sarana Pendidikan di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis	57
Tabel 4.5	Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Hutan Panjang.....	58
Tabel 4.6	Mata Pencarian Penduduk Desa Hutan Panjang.....	59
Tabel 5.1	Jenis Kelamin Responden.....	67
Tabel 5.2	Tingkat Umur Responden.....	69
Tabel 5.3	Tingkat Pendidikan Responden	70
Tabel 5.4	Pekerjaan Responden.....	71
Tabel 5.5	Jawaban Responden,Apakah Masyarakat Desa Hutan Panjang Tidak Mendapat Hak Pilihnya	73
Tabel 5.6	Jawaban Responden,Apakah Masyarakat Desa Hutan Panjang Menggunakan Hak Suaranya	74
Tabel 5.7	Jawaban Responden Mengenai Proses Pencontrengan.....	77
Tabel 5.8	Jawaban Responden Mengenai Keikutsertaan Masyarakat dalam Diskusi Politik Terkait Pencalonan Kepala Desa	79
Tabel 5.9	Jawaban Responden Mengenai, Apakah Panitia Mengundang Masyarakat Untuk Berdiskusi dalam Pemilihan Kepala Desa.....	80
Tabel 5.10	Jawaban Responden tentang Kehadiran Mereka Pada Saat Kampanye	82
Tabel 5.11	Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Kampanye yang Dilakukan Setiap Calon Kepala Desa Hutan Panjang	83
Tabel 5.12	Jawaban Responden Mengenai Masyarakat membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan	84

Tabel 5.13	Jawaban Responden Mengenai, Pernah atau tidak Diajak Untuk Menjadi Tim Sukses Oleh Calon Kepala Desa.....	85
Tabel 5.14	Jawaban Responden Mengenai, Pernah Atau Tidak Calon Kepala Desa Melakukan Sosialisasi Pribadi Keapada Masyarakat.....	86
Tabel 5.15	Jawaban Responden Mengenai apakah Panitia Pemilihan Melakukan Sosialisasi	87
Tabel 5.16	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Pemberian Suara	88
Tabel 5.17	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Keikutsertaan dalam Diskusi Politik.....	89
Tabel 5.18	Rekapitulasi Jawaban Responden, mengenai Keikutsertaan Dalam Kampanye	90
Tabel 5.19	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Keikutsertaan Masyarakat Untuk Bergabung Dalam Kelompok Kepentingan	91
Tabel 5.20	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Keikutsertaan Komunikasi Individual dengan Pejabat Politik dan Administratif.....	92
Tabel 5.21	Rekapitulasi Keseluruhan, Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Suku Akit Dalam Pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis	62
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Pemilihan kepala Desa dilakukan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Hal ini sesuai dengan pasal 203 ayat 1 undang-undang No. 32 tahun 2004 yang berbunyi: Kepala Desa dipilih langsung dari penduduk desa Warga Negara

Republik Indonesia, yang syarat selanjutnya, tata cara pemilihan diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Dengan diadakannya pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpinnya sendiri, dimana pemilihan dilakukan secara demokrasi oleh masyarakat itu sendiri. Didalam sistem demokrasi Pancasila dituntut adanya partisipasi politik dalam masyarakat, bahwasanya partisipasi adalah: kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam menentukan pemimpin daerah. (Ramlan Surbakti, 1999:118).

Secara spesifik partisipasi merupakan konsultasi dengan bawahan atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan, tentu dalam hal ini perlu didasari motivasi individu-individu dari masyarakat untuk partisipasi politik, tanpa adanya motivasi dari masyarakat maka pemilihan kepala desa tidak bisa berjalan dengan baik, karena motivasi pemberian motif atau hal yang menyangkut dorongan seseorang untuk berbuat. Motivasi adalah sebab, alasan dasar, gambaran dorongan bagi setiap orang untuk berbuat atau ide pokok yang berpengaruh sekali terhadap tingkah laku manusia (Kartini Kartono,2005:101).

Dari apa yang dikatakan Kartono tidak terlepas dari kekuasaan, artinya bagaimana seseorang calon kepala desa itu bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya pada saat pemilihan kepala desa.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku seseorang, baik secara langsung dengan jalan memberikan perintah, maupun secara langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia (Miriam Budiarjo, 2004:35).

Terakhir jumlah desa di Indonesia adalah 65,189 desa, sedangkan kelurahan berjumlah 7,787 kelurahan (Dirtjen Administrasi Kependudukan Depdagri, 2012) ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89% berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.

Seperti halnya Desa Hutan Panjang, yang mana Desa Hutan Panjang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dimana mayoritas penduduk asli Desa Hutan Panjang ialah suku Akit.

Suku Akit adalah salah satu suku bangsa yang selama ini dikategorikan sebagai suku yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Kehidupan suku Akit mayoritas masih sangat dekat dengan alam meskipun sebagian masyarakatnya sudah mengenal bahkan terpengaruh dengan budaya luar. Kebanyakan dari mereka masih menggantungkan hidupnya pada hasil hutan dan hasil laut. Mereka hidup menangkap ikan serta berkebun karet dan kelapa. Kehidupan sehari-hari mereka lebih banyak digantungkan pada alam.

Selama berpuluh tahun mereka dikenal sebagai masyarakat yang mengoptimalkan hasil alam di sekitarnya, seperti hutan bakau dan laut. Mereka juga berladang padi. Panen beras setiap tujuh-delapan bulan sekali biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Namun, kehidupan sederhana itu belakangan ini semakin terusik.

Terdesak oleh kemajuan zaman, modernisasi, mereka merasa ditinggalkan. Meskipun Pulau Rupert belum banyak disentuh ‘pembangunan’ namun karena letaknya yang cukup strategis yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, maka Pulau Rupert banyak didatangi oleh kaum pendatang seperti orang Tionghoa dan suku-suku di sekitarnya, misalnya Melayu, Bugis, Minang, Jawa dan Batak. Namun meski demikian suku Akit sampai saat ini masih taat menjalankan tradisi dan kepercayaan nenek moyangnya.

Ada pun jumlah dan persentase, jumlah penduduk di Desa Hutan Panjang dapat di lihat dalam tabel berikut:

Table 1.1
Jumlah Suku Akit yang terdaftar di Desa Hutan Panjang

No	Jenis Suku	Jumlah	Porsentase
1	Suku Akit	557	64,84 %
2	Suku Jawa	302	35,16 %
Jumlah		859	100,00 %

Sumber : Kantor Desa Hutan Panjang Tahun 2010

Dari table diatas terlihat bahwa persentase suku akit lebih banyak , yakni sebanyak 64,84 % (557 dari 859 jumlah penduduk asli desa Hutan panjang) di

bandingkan persentase suku Jawa yaitu sebanyak 35,16 % (302 dari 859 jumlah penduduk desa hutan panjang).

Masyarakat Desa sekarang jauh lebih kritis menuntut kinerja Kepala Desa lebih akuntabel dan transparan dalam mengelola kebijakan dan keuangan Desa. Kelahiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi aktor baru pendorong demokrasi, yang mengurangi dominasi “penguasa tunggal” kepala Desa. Masyarakat berharap bahwa kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi dorongan baru bagi demokrasi Desa, yakni sebagai artikulator aspirasi dan partisipasi masyarakat, pembuat kebijakan secara partisipatif dan alat kontrol yang efektif terhadap Pemerintah Desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa di era transisi demokrasi Desa telah membuat pemerintah Desa lebih “hati-hati” dalam bertindak dan membuat ruang politik Desa semakin semarak. Hal ini menjadi peran partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa menjadi suatu hal yang sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dan diharapkan dapat memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat.

Disini juga suku Akit dituntut untuk ikut serta berpartisipasi dalam praktek demokrasi yaitu dalam pemilihan kepala desa, supaya perjalanan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, adapun jumlah suku Akit di desa hutan panjang yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Table 1.2
Keadaan Penduduk yang terdaftar di DPT dalam Pemilihan Kepala Desa
Hutan Panjang tahun 2010

No	Jenis Suku	Jumlah	Porsentase
1	Suku Akit	343	61,57 %
2	Suku Jawa	214	38,43 %
Jumlah		557	100,00 %

Sumber : Kantor Desa Hutan Panjang Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase penduduk suku akit yang bisa memilih / menggunakan hak suaranya lebih banyak , yakni sebanyak 61,57 % (343 dari 557 jumlah penduduk asli desa Hutan panjang) di bandingkan persentase penduduk suku jawa yang bisa memilih / menggunakan hak suaranya lebih banyak yaitu sebanyak 38,43 % (214 dari 557 jumlah penduduk desa hutan panjang).

Namun dalam prakteknya tingkat partisipasi suku akit dalam pemilihan kepala desa di desa hutan panjang tergolong masih rendah, karena melihat tabel hasil pemilihan kepala desa hutan panjang pada tahun 2010, yang mana pemilihan tersebut di lakukan di 3 (tiga) TPS, yang mana TPS 1 (satu) terletak di Dusun Hutan panjang dengan penduduk 100% suku akit, TPS 2 (dua) terletak di Dusun Tanah Runtuh dengan penduduk 100% suku akit sedangkan TPS 3 (tiga) terletak di dusun Sungai kolam yang berdomisili 100% suku jawa. Dalam hal ini dapat di lihat tabel hasil pungutan suara sebagai berikut;

Tabel 1.3
Persentase masyarakat yang tidak memilih dalam pemilihan kepala desa
Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

No	Tempat Pemilihan	Jumlah Pemilih Tetap	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara tidak sah	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak pilihnya	persentase yang tidak menggunakan Hak pilihnya
1	TPS 1	193	90	9	92	26,82 %
2	TPS 2	150	74	7	69	20,16 %
Jumlah		343	164	16	161	46,98 %

Sumber : Kantor Desa Hutan Panjang Tahun 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase suku akit yang tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 (satu) sebesar 26,82%, sedangkan pada TPS 2 (dua) sebesar 20,16%.. Jadi tingkat partisipasi suku akit dalam pemilihan kepala desa hutan panjang tergolong rendah, karena di lihat dari jumlah suku akit yang tidak menggunakan hak suaranya sebanyak 161 dari 343 penduduk suku akit di desa hutan panjang atau sekitar 46,98% jumlah yang tidak menggunakan hak suaranya. Semua ini terjadi karena mereka kurang beradaptasi dengan kelompok kepentingan, sehingga mereka tidak mengetahui akan berpolitik. Disini mereka timbul rasa malas untuk menghadiri ke Tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Amran selaku Kepala Desa Hutan panjang, semua ini sulit dibenahi kenapa demikian, ini semua dikarenakan masyarakat suku akit itu kurangnya kesadaran akan dunia politik, bahkan mereka tidak mau memahami tentang dunia politik, ini semua karena mereka tidak ada yang memberikan pencerahan pikiran tentang kemajuan zaman, mereka

selama ini hanya memikirkan kehidupan mereka saja dan sangat menghargai dan menjaga adat istiadatnya.

Berdasarkan keterangan dan gejala-gejala yang terjadi seperti yang diterangkan diatas maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Partisipasi Politik Masyarakat Suku Akit Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : **“Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Suku Akit dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui **“ Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Suku Akit dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis ?**

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintahan desa Hutan Panjang dalam melaksanakan pemilihan kepala desa.
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.
4. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.
5. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang pemilihan kepala desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, menulis membaginya kedalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat suku akit dalam pemilihan kepala desa di desa hutan panjang yang dilakukan

dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini akan ada dua sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca dan Universitas.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Partisipasi

Istilah partisipasi berasal dari kata latin *participation* atau bahasa inggrisnya yaitu *participation* yang berarti kerja sama, yang intinya menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara kebersamaan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Artinya partisipasi mengandung pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih.

Partisipasi masyarakat menurut Peraturan Pemerintah RI No. 72 dan 73 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 (2007:259) adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

Menurut Wahyudi Kumorotomo, (Efriza 2012:151) mengatakan, partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya. Lebih jauh Wahyudi mengingatkan, secara umum corak partisipasi warga Negara dibedakan menjadi empat macam:

1. Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*)
2. Partisipasi kelompok (*group participation*)

3. Kontak antara warga Negara dengan warga pemerintah (*citizen government contacting*)
4. Partisipasi warga Negara secara langsung.

Bagi Abdul Azis Saleh, (Efriza 2012:151), kehidupan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata), yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat, dan berfikir mempertanyakan (*critical thinking*).

Partisipasi juga dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan public, baik yang memiliki dimensi politik maupun non-politik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga. Dalam berbagai kegiatan pemilu (legislative, presiden, kepala daerah, dan kepala desa) di Indonesia, warga merancang tempat dan lokasi pemilihan sedemikian rupa supaya warga tertarik datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kegiatan-kegiatan seperti ini dimengerti sebagai partisipasi (Efriza 2012:152).

Pentingnya partisipasi masyarakat dilaksanakan menurut pendapat Conyers (1994:154-155) didasarkan kepada tiga alasan utama yaitu :

Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa terlibat

dalam proyek persiapan dan perencanaannya karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

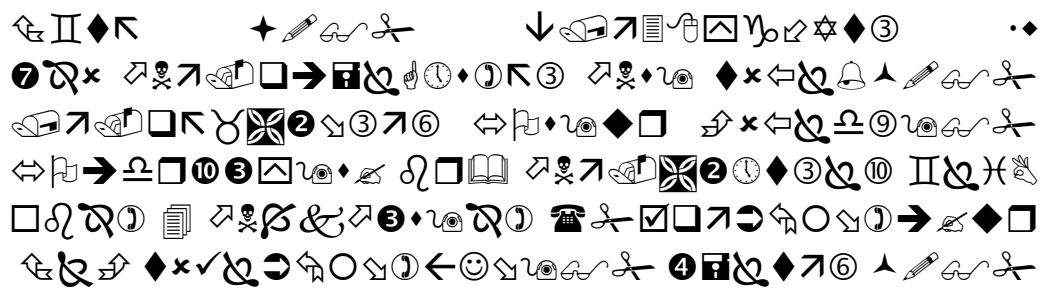
Pasaribu Simanjuntak (Efriza 2012:151) mengemukakan pendapat bahwa dalam menggerakan partisipasi masyarakat perlu adanya:

Mengklasifikasikan jenis partisipasi yaitu semacam sumbangan yang diberikan kelompok yang berpartisipasi. Sumbangan dalam berpartisipasi berjenis-jenis seperti:

1. Partisipasi buah pikiran yang diberikan dalam rapat.
2. Partisipasi tenaga yang diberikan dalam pembangunan atau perbaikan pembangunan.
3. Partisipasi harta benda dan uang yang diberikan dalam menolong aneka ragam industri.
4. Partisipasi sosial yang diberikan sebagai tanda kedekatan.
5. Mewadahi partisipasi.
6. kegairahan partisipasi tidak melayang.
7. Menciptakan prasyarat partisipasi, yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sosial seperti rasa senasib sepenanggungan, keterlibatan tujuan hidup kemampuan menyesuaikan, adanya prakarsa iklim partisipasi.

Partisipasi masyarakat ini perlu diwadahi agar Senada dengan itu, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri (dalam Sundria Munawar,2006:47) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dapat digolongkan sebagai partisipasi berupa dana (barang atau benda), partisipasi berupa tenaga (fisik), partisipasi berupa keahlian (keterampilan).

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat 8 juga dijelaskan agar kita selalu berbuat baik dan adil terhadap sesama manusia dengan menyamakan perbedaan pendapat:



Artinya : “ Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Musyawarah merupakan sesuatu yang disukai Allah dalam setiap penyelesaian masalah menurut konteks agama Islam. Karena dengna musyawarah segala keputusan publik yang diambil serta akan memberikan keputusan, keadilan dan dalam pelaksanaannya mendapat dukungan masyarakat yang cukup kuat seperti yang diharapkan dalam setiap proses pembangunan. Ketertiban

masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang dapat memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, social dan budaya. Oleh karena itu, setiap pengambil kebijakan hendaknya berlaku adil dalam memutuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau pembangunan dengan mengesampingkan kepentingan individu, kelompok atau golongan sehingga nantinya didapatkan suatu keputusan yang berskala prioritas dalam pembangunan.

Perhatian terhadap pentingnya partisipasi akan menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan dan memperoleh nilai-nilai dari suatu kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini semua sangat dibutuhkan Didesa Hutan Panjang dalam pemilihan Kepala Desa secara demokrasi, karena satu suara sangat berharga dan sangat menentukan nasib suatu desa untuk kedepannya.

2.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karna kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.(Miriam Budiardjo:2004:369)

Michael Rush & Philip Althoff (A.A.Sahid Gatara, 2008:310) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada macam-macam tingkatan didalam sistem politik.

Menurut Sudijono Sastroatmodjo (Efriza 2012:156) mengatakan partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (2008:311) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung, yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti (2008:311), partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (Efriza 2012: 155) mengatakan batasan dari partisipasi politik “ keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik.

Dikemukakan juga dalam buku A.A.Sahid Gatara oleh Kevin R.Hardwic (2008:310) bahwa partisipasi politik adalah memberi perhatian pada cara-cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (Efriza 2012:155) partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif, atau tidak efektif.

Di indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh pemimpin politik dan pemerintah. Minsalnya ungkapan pemimpin “ Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing “.sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. Bagaimana pula dengan masyarakat Hutan Panjang dalam menggunakan kata partisipasi politik ini, kenyataannya mereka sedikitpun tidak mengetahui tentang partisipasi politik itu, partisipasi saja mereka masih kurang

apalagi mereka mau menggunakan partisipasi politik itu sendiri dalam kehidupannya.

2.2.1 Sifat-sifat Partisipasi Politik

Menurut ilmuan Indonesia Dedi Irawan (Efriza 2012:168), menjelaskan bahwa sifat partisipasi politik terdiri dari lima bentuk yakni:

1. Legal (sesuai dengan “prosedur”) dan illegal (tidak “procedural”)
2. Konvensional (lunak) dan Non Konvensional (kekerasan politik)
3. Otonom dan mobilisasi
4. Mendukung dan menolak
5. Langsung atau tidak langsung.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond (2012:172). Berbagai bentuk partisipasi politik berdasarkan kelompok-kelompok berikut :

1. Kelompok Kepentingan; mereka dapat duduk dalam badan pengawasan pemerintah (*ombudsman*), misalnya dalam masalah pelayanan publik.
2. Kelompok Anomik; mereka adalah kelompok yang terbentuk secara spontan karena rasa frustrasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain, mereka turun kejalan karna rasa keadilan.

3. Kelompok non-asosiasional; sangat jarang sekali terorganisasi, disebabkan aktivitas mereka yang sangat episodic pula.
4. Kelompok institusional; merupakan bentuk kelompok yang lebih canggih karena sudah berupa parpol, korporat bisnis, legislative, militer, birokrasi, persekutuan gereja, majelis ulama, dimana mereka mendukung kelompok khusus dan memiliki anggota dengan tanggung jawab khusus untuk mewakili kepentingan kelompok.
5. Kelompok asosiasional; merupakan kelompok yang dibentuk untuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, termasuk serikat pedagang dan serikat pengusaha.
6. Kecenderungan sekarang ini timbul kelompok besar keenam, yaitu *civil society*, (masyarakat sipil) dimana kelompok masyarakat terjun berintraksi secara social dan politik tanpa campur tangan, atau kontrol dari pemerintah berupa aturan. Mereka merupakan asosiasi bersifat sukarela.

2.2.3 fungsi –fungsi Partisipasi Politik

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Robert Lane (Efriza 2012:188) dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu.

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.

3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu.

2.2.4 Sebab-Sebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik.

Menurut Myron Weiner (Efriza 2012:163), terdapat 5 hal yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu:

1. Modernisasi.
2. Perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial
3. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern
4. Konflik diantara kelompok-kelompok Pemimpin Politik
5. Keterlibatan Pemerintah yang meluas dalam urusan sosial,ekonomi, dan kebudayaan.

2.2.5 Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat.

Menurut Arntein (Efriza,2012:193) menjelaskan factor pendukung partisipasi antara lain:

1. Komunikasi politik
2. Kesadaran Politik
3. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan
4. Control masyarakat terhadap kebijakan public.

Menurut Gabriel Almond (Efriza,2012:115), budaya politik dikelasifikasikan sebagai berikut:

- 1.) Budaya Politik Parokial (tingkat partisipasi politik yang sangat rendah).
- 2.) Budaya politik kaula (pada partisipasi politik ini,masyarakat yang bersangkutan sudah relative maju, tapi masih bersifat pasif).
- 3.) Budaya politik partisipan (budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi).

Dalam sosialisasi politik proses dengan bagaimana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Alat yang dapat dijadikan perantara dalam sosialisasi politik (Efriza 2012:63) antara lain:

1. Keluarga.

Pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun tidak langsung merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang, karenanya sosialisasi keluarga sangatlah kuat dan kekal.

2. Sekolah

Sekolah memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang dunia politik peran si individu tersebut dalam aktivitas politik tersebut. Sekolah juga merupakan pewarisan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya.

3. Kelompok teman sebaya (*peer group*)

Kelompok pergaulan juga memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi politik. Kelompok pergaulan adalah pemberi sosialisasi yang biasanya lebih dipercaya oleh anggota kelompoknya

4. Media massa

Media massa banyak memberikan informasi-informasi yang tengah berkembang dimasyarakat, sehingga individu akan memahami kejadian-kejadian lingkungan tanpa perlu hadir dalam peristiwa tersebut.

5. Kontak-kontak politik langsung.

Sebaik –baiknya penanaman nilai-nilai politik yang diterima individu tetapi jika ia secara langsung menerima kenyataan politik yang pahit, minsalnya, merasakan bagaimana reaksi pemerintah terhadap tuntutan. Menyebabkan, sosialisasi politik tersebut berjalan tidak efektif.

2.3 Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *musyarak* yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Menurut Ralp Linton (dalam Abdul Syani,(2002:31) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Bercampur untuk waktu yang lama.
2. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
3. Mereka merupakan satu sistem hidup bersama.

Menurut Harold J. Laski (Miriam Budiarjo, 2004:34) masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja bersama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama, yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dan harus ditaati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan terjaga keamanannya.

Harold Laswell (Miriam Budiarjo, 2004:33) mengamati kehidupan masyarakat disekelilingnya, yaitu masyarakat barat ia memperinci delapan nilai yang diinginkan, yaitu: kekuasaan, pendidikan/penerangan, kekayaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran, kesegaran. Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam hubungan dengan orang lain, pada dasarnya manusia pasti menginginkan nilai-nilai tersebut, karena nilai-nilai diatas merupakan suatu kebutuhan yang ingin diwujudkan dan menjadi impian bagi setiap orang. Untuk memenuhi nilai-nilai, maka tidak heran jika manusia menghalalkan segala cara dan tidak lagi menghiraukan situasi dan kondisi yang terjadi dilingkungan sekitarnya

2.4 Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.

Hendry B. Mayo (2003:19), sistem politik demokrasi adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan oleh kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari bendirinya Negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”, menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah :

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan didepan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerja sama dan mufakat.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.

Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu :

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Dalam perkembangan, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh Negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan warga Negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara)
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang.

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin Negara dan pemerintah serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

2.5 Pemilihan Kepala Desa

Desa yaitu suatu wilayah yang telah ditempati oleh sejumlah penduduk atau masyarakat, ada aturan hukum yang mengatur, mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang N0. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 6 yang berbunyi Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Alfian (1986:26), hal yang mempengaruhi dalam mendorong munculnya kecenderungan untuk berbuat dan bersikap mau benar sendiri dikalangan golongan elit, baik yang berada dalam lingkungan kekuasaan maupun yang luarnya adalah pola dan sikap tingkah laku politik masyarakat yang banyak ditentukan oleh hubungan primordial dan emosional, dengan anggota elit yang menjadi pimpinan mereka berdasarkan tali ikatan suku, agama, hubungan darah, persahabatan dan kesamaan tradisi (Rafiel Raga Maran, 2001:140).

Dari apa yang dikatakan oleh Alfian diatas dapat kita simpulkan bahwa hubungan kesukuan, hubungan kekeluargaan dan persahabatan sangatlah menentukan seseorang akan dipilih menjadi pemimpin, hal ini masih terjadi di Negara Indonesia tidak dapat kita pungkiri, hubungan seseorang calon pemimpin yang akan ikut dalam pemilihan.

Menurut Hanif Nurholis (2011:2) mengatakan bahwa desa merupakan wilayah yang ditinggali yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki

adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Dalam menyelenggarakan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas unsur staf dan unsur pelaksana; sekretariat desa sebagai unsur staf dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana.

Pemilihan Kepala Desa adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa sebagai pemimpin formal di Desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa itu sendiri. Sifat demokratis harus ada dan dipertahankan, bukan semata-mata karena sendi-sendi kehidupan demokratis dapat menjamin terselenggaranya pembangunan Desa, akan tetapi pembangunan Desa memerlukan dukungan dari masyarakat. UU No.22/1999 juga telah mendorong proses demokratisasi di tingkat Desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan Kepala Desa untuk mendapat jabatan Kepala Desa tersebut dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan Kepala Desa.

Partisipasi masyarakat yang oleh calon kepala desa adalah ditunjukkan dalam dukungan didalam memberika suaranya terhadap calon kepala desa, dimana setiap calon kepala desa berusaha untuk memperoleh suara terbanyak didalam pemilihankepala desa tidak hanya dilihat dari pemberian suara, tetapi dapat dilihat dari tahap pemilihan itu sendiri, yaitu:

2.5.1 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (pasal 2)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari para anggota BPD dan perangkat desa dan di usulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 12 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1 dan 2)

2.5.2 Pendaftaran Pemilih (pasal 3)

Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh petugas pendaftaran pemilih secara terbuka dengan membuktikan identitas diri. Terdaftar sebagi penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran terpilih.

Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah / pernah pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan KK/KTP. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2.5.3 Pencalonan Kepala Desa (pasal 5)

Yang dapat di pilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia.
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan bertaqwa.
4. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan suatu kegiatan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S PKI dan suatu kegiatan organisasi terlarang lainnya.
5. Sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.
6. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran.
7. Sehat rohani dan jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
8. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan, Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum yang tetap.
9. Tidak pernah dihukum penjara karena tindakan pidana atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan.

10. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada suatu pendaftaran.
11. Mengenal daerahnya dan di kenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan.
12. Bersedia di calonkan sebagai kepala desa.
13. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

2.5.4 Kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa (pasal 13)

Menurut Lilliker (Efriza 2012:470) mengatakan bahwa kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua konsestan, baik parpol maupun perseorangan, untuk memaparkan program-program kerjadan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan.

Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak di pilih untuk menyampaikan program-program kerja yang akan di laksanakan apabila yang bersangkutan berhasil di pilih menjadi kepala desa.

BPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan Kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan Kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan Kampanye para calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

Panitia melakukan undian nomor urut berdasarkan foto calon, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi berita acara. Pemasangan foto calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang dilingkungan rumah calon Kepala Desa serta dilakukan pada siang hari.

Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

2.5.5 Pemungutan Suara (pasal 15)

Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan waktu pemungutan suara dan tanda gambar calon kepala desa setelah berkoordinasi dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara di sesuaikan dengan kebutuhan kondisi sosial masyarakat setempat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.5.6 Penghitungan Suara (pasal 22)

Penghitungan suara di laksanakan di hadapan saksi setelah panitia pemilihan kepala desa mengumumkan bahwa pemungutan suara telah di tutup. Kemudian setelah semua perlengkapan disediakan oleh panitia, penghitungan suara dapat dimulai.

Dari enam tahapan tersebut, semua tahapan memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengsucceskan pemilihan kepala desa tersebut, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka akan sulit untuk mengharapkan terjadinya proses demokrasi ditengah-tengah masyarakat (Rafiel Raga Maran,2003:3).

2.6 Cara Memilih Pemimpin Menurut Islam

Pemimpin adalah faktor penting dalam kehidupan. Jika pemimpin itu jujur, baik, cerdas dan amanah, niscaya rakyatnya akan makmur. Sebaliknya jika pemimpinnya tidak jujur, korup, serta menzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara.

Kemudian dari Abu Hurairah ra, ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “ada tujuh golongan manusia yang kelak akan memperoleh naungan dari Allah pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan-Nya, (mereka itu ialah):

1. imam/pemimpin yang adil
2. pemuda yang terus-menerus hidup dalam beribadah kepada Allah

3. seseorang yang hatinya tertambat di masjid-masjid
4. dua orang yang bercinta-cintaan karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisahpun karna Allah
5. seorang pria yang diajak (berbuat seorang) oleh seorang wanita kaya dan cantik, lalu ia menjawab “sesungguhnya aku takut kepada Allah”
6. seorang yang bersedekah dengan satu sedekah dengan amat rahasia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya
7. seorang yang selalu ingat kepada Allah (dzikirullah) di waktu sendirian hingga meleleh air matanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

keadilan yang diserukan Al-Qur'an pada dasarnya mencakup keadilan dibidang ekonomi, sosial, dan terlebih lagi, dalam bidang hukum. Seorang pemimpin yang adil, indikasinya adalah selalu menegakkan supremasi hukum; memandang dan memperlakukan manusia sama didepan hukum tanpa pandang bulu. Hal inilah yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah ketika bertekad untuk menegakkan hukum (dalam konteks pencurian), walaupun pelakunya adalah putri beliau sendiri.

Abu Hasan Alkawardi dalam buku politiknya 'Al -Ahkam As-Sulthaniyah' (2002:67) menegaskan mengangkat dan menegakkan kepemimpinan merupakan kewajiban agama yang bersifat kifa'I yang menuntut dengan panduan islam dan member kemaslahatan serta kesejahteraan bagi seluruh komponen umat.

Kewajiban menegak kepemimpinan sama dengan kewajiban jihad dan menuntut ilmu. Jika sudah ada yang memegang tampuk kepemimpinan dari mereka yang layak untuk itu maka gugurlah kewajiban atas semua umat. Namun jika belum ada, maka kewajiban tetap berlaku atas semua imam sampai terbentuknya kepemimpinan. Beliau menukil sebuah hadits dari Abu Hurairah tentang kemungkinan terjadinya kepemimpinan pasca Rasulullah dan sikap yang harus ditunjukkan oleh umat terhadap model kepemimpinan tersebut.

Adanya perintah agar Nabi saw menjelaskan kepada umat manusia mengenai Al-Qur'an, baik melalui ucapan, perbuatan atau taqrirnya. Dan hadits berfungsi sebagai bayan (penjelas) terhadap Al-Qur'an.

Mengenai pentingnya hadits (As-sunnah) dalam ajaran islam, Nabi saw sendiri pernah bersabda melalui hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yaitu:

“aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua hal. Jika kalian mau berpegang teguh kepadanya niscaya kamu sekalian tidak akan sesat selama-lamanya, dua hal itu adalah kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya (Al-Hadits). (H.R Imam Malik).

2.7 Penelitian Pendahuluan

Resdati (2011), Universitas Negeri Riau, dalam penelitiannya tentang, Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanjung Hutan

Kecamatan Buru Kabupaten Karimun”. Hasil penelitian Resdati memberikan kesimpulan bahwa tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun masih rendah, karena rata-rata responden menanggapi dengan katagori kurang baik. Yang mana masyarakat desa tanjung hutan lebih banyak yang pasif dari pada yang aktif dengan sekor nilai 63.

Ikhsan Fitra (2009), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam penelitiannya tentang, “Partisipasi Masyarakat Kuantan Singingi dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Langsung”. Hasil penelitian Ikhsan Fitra memberikan kesimpulan bahwan tingkat Partisipasi Masyarakat Kuantan Singingi dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Langsung tergolong tinggi namun pendidikan politik masyarakat tergolong rendah, karena rata-rata responden menanggapi dengan katagori baik.

Edi Zarman (2010), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam penelitian tentang, “Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian Edi Zarman memberi kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Ranah Sengkuang dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADA) langsung tergolong baik itu terbukti dari beberapa komposisi. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan dan keikutsertaan masyarakat dalam

mengsukseskan pemilihan Kepala Desa tersebut serta kesediaan masyarakat untuk ikut menjadi panitia.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan dalam suatu permasalahan terkait tentang Partisipasi Masyarakat Suku Akit dalam Pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Hutan Panjang, yang mana penulis mengamati bahwa partisipasi suku akit dalam pemilihan kepala desa hutan panjang tergolong rendah. Jadi, judul dalam penelitian ini ialah “Partisipasi Politik Masyarakat Suku Akit Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”.

2.8 Konsep Operasional

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan penggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai suatu volume. Dalam hal ini untuk memberi batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun defenisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah:

1. Partisipasi Politik Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (Efriza 2012:178) adalah keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik diantaranya yaitu:
 - a. *Pemberian Suara* (voting)

Voting adalah bentuk partisipasi politik yang dapat “diukur” dengan “alat ukur”-nya adalah skala waktu atau priodisasi. Kegiatan voting ini juga adalah sebagai bentuk partisipasi politik yang paling minor, karena hanya dilakukan sewaktu-waktu saja (tidak rutin).

b. Kampanye Politik

Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain agar orang atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang berkampanye (dalam kegiatan khusus, misalnya pemilu). Kegiatan ini juga berjalan sewaktu-waktu saja (kontemporer).

c. Aktivitas Group

Kegiatan politik yang digerakkan oleh sebuah kelompok secara sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik, perang grilya, teror, intimidasi dll.

d. Kontak Politik (lobby politik)

Kegitan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol (atau elit politik,dll).

2. Masyarakat Desa merupakan kumpulan dari individu-individu yang mendiami suatu daerah, dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat

Suku Akit Desa Hutan Panjang kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis yang telah berhak memilih atau yang telah mempunyai hak pilih, telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

3. Suku Akit merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah Provinsi Riau. Suku Akit merupakan suku asli yang mendiami wilayah Pulau Rupert tepatnya di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.
4. Desa merupakan suatu wilayah yang telah ditempati oleh sejumlah penduduk atau masyarakat, ada aturan hukum yang mengatur, mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

Tabel 2.1
Konsep Operasional Penelitian

Defenisi Konsep	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Menurut Michael Rush dan Philip Althoff mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik.	Partisipasi Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Suara (voting) 2. Keikutsertaan dalam suatu Diskusi Politik 3. Kegiatan Kampanye 4. Tercatat sebagai anggota biasa dalam suatu Ormas/LSM yang bernuansa politik. 5. Tercatat sebagai pengurus aktif dalam dalam suatu Ormas/LSM 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sering b. Jarang c. Tidak Pernah

		yang bernuansa politik.	
--	--	-------------------------	--

Sumber : Data Olahan 2012

2.9 Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiono, 2005:183). Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil hipotesa bahwa “ ***Di duga kurangnya Partisipasi Masyarakat Suku Akit dalam Pemilihan Kepala Desa Didesa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis***”.

2.10 Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat suku akit dalam pemilihan kepala desa, maka penulis melakukan pengukuran dengan menggunakan *skala likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Sesuai dengan yang dipersentasekan oleh Arikunto (2010:217)

Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata.

Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, maka jawaban dari responden dalam kuesioner diberi skor :

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. Baik | diberi skor | 3 |
| 2. Kurang baik | diberi skor | 2 |
| 3. Tidak baik | diberi skor | 1 |

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada tanggal 26 februari-28 juni tahun 2012. Alasan penulis memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan suatu yang penting dalam mewujudkan program-program yang ada di Desa. Apalagi dalam pemilihan Kepala Desa itu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perkembangan dan kemajuan pemerintah Desa kedepannya. Menurut pengamatan penulis dilokasi penelitian ini, dalam pemilihan kepala Desanya belum berjalan dengan ketentuan yang ada, masyarakat suku akit di Desa Hutan Panjang ini masih kurang partisipasi dari mereka, jadi pengambilan suara sangat susah disaat pemilihan Kepala Desa.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Sabjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang dapat memberikan keterangan atau informasi kepada peneliti. Yang menjadi subjek penelitian pada

penelitian ini adalah masyarakat suku akit , Kepala Desa, dan panitia KPU di Desa Hutan Panjang.

3.2.2 Objek Penelitian

Penelitian ini adalah partisipasi masyarakat suku akit dalam pemilihan Kepala Desa. Menurut Husen Umar (2005:303) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut : “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, biasa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.” Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kepala Desa dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Desa Hutan Panjang. Di pilihnya Kantor Kepala Desa dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai objek penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kantor Kepala Desa dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki data yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi, data pemilihan kepala Desa dan data partisipasi masyarakat suku akit dalam pemilihan kepala Desa seperti menyumbang buah pikiran, tenaga , harta benda, social dan lain-lain, serta data-data lain yang berhubungan dengan hal yang diteliti.

3.3.2 Data Skunder

Data sekunder yaitu kegiatan penelitian yang menelaah buku-buku, informasi-informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari instansi pemerintah seperti luas dan batas wilayah, keadaan penduduk, perekonomian, dan lain-lain.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Arikunto (2003:173) mengatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat suku akit di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berjumlah 343 orang.

3.4.2 Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi nara sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari seratus, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika subjeknya besar data diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. (Suharsimi

Arikunto, 2002:112), karena penelitian ini populasinya cukup besar untuk itu penelitian ini mengambil sampel sebesar 10% dari jumlah populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat suku akit Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat di lihat dengan menggunakan rumus Slovin (Umar,2005:146) yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

$$n = \frac{343}{1 + 343 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{343}{1 + 343 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{343}{1 + 343 (0,01)}$$

$$n = \frac{343}{4,43}$$

$$n = 77,42$$

$$n = 77 \text{ orang}$$

Dimana : n = ukuran sampel

: N = total populasi

: e = tingkat error (toleransi kesalahan) dari sampel sebesar 10%

Jadi dari perhitungan jumlah populasi masyarakat sebesar 343 orang dengan jumlah kelonggaran 10% maka dari hasil perhitungan dengan rumus Slovin tersebut didapatkan sampel sebanyak 77,42 orang yang dibulatkan menjadi 77 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling yaitu pengambilan sample yang dilakukan secara acak.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Angket (Questioner)

Yaitu penulis membuat beberapa pertanyaan tertulis beserta alternative jawabanya, responden hanya tinggal menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kelayakan. Teknik pengumpulan data dengan cara angket pada penelitian ini di tujukan kepada seluruh sampel penelitian yaitu masyarakat suku akit di desa hutan panjang kecamatan rupa kabupaten bengkalis.

3.5.2 Wawancara (interview)

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan Tanya jawab secara langsung dan terbuka dengan pihak yang terkait dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Wawancara pada penelitian ini di tujukan kepada Kepala Desa Hutan Panjang dan Ketua KPU Desa Hutan Panjang, kepala suku masyarakat suku akit (Bapak Batin), Desa Hutan Panjang Kaecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

3.6 Analisa Data

3.6.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu deskriptif, maka analisa datanya menggunakan deskriptif kualitatif dengan persentase dan digambarkan pula dalam bentuk kata-kata atau kalimat terpisah menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.

Hal tersebut dilakukan agar data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis memisah-misahkan data menurut jenisnya. Setelah data terpisah menurut jenisnya, maka baru dilakukan kegiatan yang dinamakan meneliti data, setelah itu baru dianalisa dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian yang dilengkapi dengan tabel.

3.6.2 Rumus Statistik

Menurut Arikunto (2006:79), dalam menganalisa data penulis akan menuangkannya dengan teknik deskriptif kuantitatif yaitu dengan persentase dengan rumusan sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Dimana :

P = Persentase

F = Frekuensi

N= Total Jumlah

Ketentuan penilaian yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a) Baik = 76% - 100%
- b) Kurang Baik = 56% - 75%
- c) Tidak Baik = 40% - 55 %

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Geografis Desa Hutan Panjang

Suku Akit merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah Provinsi Riau. Suku Akit merupakan suku asli yang mendiami wilayah Pulau Rupat tepatnya di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Suku ini telah lama mendiami pulau ini sebelum suku-suku lainnya menjadikan pulau ini sebagai tempat tinggal. Mata pencarian Suku Akit adalah dari berburu dan meramu. Saat ini Suku Akit telah banyak berbaur dengan masyarakat lainnya.

Suku Akit adalah salah satu suku bangsa yang selama ini dikategorikan sebagai suku yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Kehidupan suku Akit mayoritas masih sangat dekat dengan alam meskipun sebagian masyarakatnya sudah mengenal bahkan terpengaruh dengan budaya luar. Kebanyakan dari mereka masih menggantungkan hidupnya pada hasil hutan dan hasil laut. Mereka hidup menangkap ikan serta berkebun karet dan kelapa. Kehidupan sehari-hari mereka lebih banyak digantungkan pada alam. Selama berpuluh tahun mereka dikenal sebagai masyarakat yang mengoptimalkan hasil alam di sekitarnya, seperti hutan bakau dan laut. Mereka juga berladang padi. Panen beras setiap tujuh-delapan bulan sekali biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Namun, kehidupan sederhana itu belakangan ini semakin terusik.

Terdesak oleh kemajuan zaman, modernisasi, mereka merasa ditinggalkan. Meskipun Pulau Rupert belum banyak disentuh ‘pembangunan’ namun karena letaknya yang cukup strategis yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, maka Pulau Rupert banyak didatangi oleh kaum pendatang seperti orang Tionghoa dan suku-suku di sekitarnya, misalnya Melayu, Bugis, Minang, Jawa dan Batak.

Namun meski demikian suku Akit sampai saat ini masih taat menjalankan tradisi dan kepercayaan nenek moyangnya. Jika ditinjau dari segi kesejarahan, kata Akit berasal dari kata rakit, sebab suku Akit secara singkat dapat dikatakan suku rakit, orang rakit atau tukang rakit. Suku ini pada mulanya telah menjadi rakyat Kerajaan Gasib-Siak. Mereka mendapat tugas dari Sultan Siak mengambil dan merakit kayu. Mereka telah dibagi menjadi tiga tugas, yaitu:

1. Rombongan yang merakit di sungai, disebut Akit Biasa;
2. Rombongan yang merintis jalan di sungai disebut dengan Akit Ratas; dan
3. Rombongan yang menebang kayu di hutan yang disebut dengan Akit Hutan.

Menurut beberapa sumber tradisi lisan, Suku Akit Hutan inilah yang kemudian menjadi suku hutan. Kayu hasil rakitan inilah yang kemudian hari dijual oleh Kerajaan Siak sebagai salah satu sumber pendapatannya pada abad ke-18.

Nusrin Caniago (1985) mengutip pendapat H.A. Hijmans van Anrooij (1885:347) dalam *Het Rijk van Siak*, mengatakan suku Akit merupakan keturunan orang pesisir Timur Sumatera. Mereka mengembara sepanjang pantai

selatan Selat Malaka. Suku Akit di Siak dikatakannya terbagi atas Akit Peguling dan Akit Morong. Yang terakhir itu terbagi atas Akit Ratas dan Akit Biasa.

Sedangkan WBC Wintgest dan E.M. Unlenbech dalam *Encyclopaedic van Nederlandsche Indie*, berpendapat bahwa orang Akit ini termasuk keturunan bangsa Negritisch (Negrito). Hal ini tampak dari rambut mereka yang keriting dan badan yang kekar besar. Mereka mendiami Sungai Mandau cabang Sungai Siak. Jumlah mereka pada abad ke-15 ditaksir sekitar 300 orang, dengan jumlah perempuan lebih sedikit dari lelaki. Mereka membuat rumah di atas rakit, mempunyai perapian dari pasir dan abu.

Tetapi tradisi lisan yang berkembang pada tokoh-tokoh adat Suku Akit, misalnya tradisi lisan yang diketahui oleh Batin (Kepala Suku) Hutan Panjang di Pulau Rupat menyebutkan bahwa berasal dari rakyat Kerajaan GASIB abad 15-17. Setelah Aceh menyerang Gasib mereka menghindar ke Sungai Mandau mempergunakan rakit. Di Mandau bertemu dengan Akit Perawang dan Sakai.

Setelah muncul Kerajaan Siak menggantikan Kerajaan Gasib tahun 1723, maka daerah mereka termasuk daerah Kesultanan Siak dibawah kekuasaan Datuk Laksamana Bukit Batu. Karena mereka tidak mempunyai hak atas tanah ulayat (sebab yang berkuasa adalah Batin Perawang) maka mereka meminta pindah ke Pulau Rupat. Untuk mendapatkan Pulau Rupat, mereka harus menebus pulau itu kepada orang Rempang berupa sekerat tampi sagu, sekerat mata beras, sekaerat dayung emas dan sekerat mata kujur (kojor). Karena orang Akit tidak memenuhi

syarat itu, maka mereka mengadu kepada Datuk Laksamana Bukit Batu. Datuk menyampaikan keinginan mereka kepada Sultan Siak. Sultan pun memberikan izin, Datuk Laksamana Bukit Batu diutus untuk memberikan semua syarat, sambil mengantarkan orang Akit ke Pulau Rupert.

Jumlah penduduk yang pindah saat itu diperkirakan lebih kurang 200 orang lelaki dan perempuan, dewasa dan anak-anak. Dalam serah terima tersebut orang Rempang telah berpesan kepada orang Akit “Pulau Rupert ini jangan sampai diserahkan lagi kepada tangan orang lain”. Semenjak saat itu suku Akit telah menetap disana. Selama di Rupert ini orang Akit mempunyai enam orang Batin, yaitu :

1. Batin Boja disebut juga dengan Batin Naeng (kuat);
2. Batin Betirpas;
3. Batin Sisik;
4. Batin Monong;
5. Batin Koding; dan
6. Batin Gelimbing yang sekarang berkedudukan di Desa Titi Akar, Kecamatan Rupert Utara. Sebagai Batin Titi Akar ini sekarang adalah Bapak Sailan.

Peran Batin ini sangat erat kaitannya dengan mempertahankan tradisi dan adat istiadat mereka. Batin berperan dalam siklus kehidupan suku Akit, baik yang terkait dengan kegiatan pertanian, melaut, upacara-upacara adat dan ritual, serta

kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya terkait dengan adat dan tradisi yang sampai saat ini masih mereka pegang dengan teguh. Upacara-upacara seperti buang anca, dan upacara-upacara terkait dengan pertanian masih mereka lakukan. Demikian juga peran bomo (dukun) masih berfungsi baik sebagai orang pintar terkait dengan badekeh dan kegiatan lainnya. Dewasa ini Batin juga telah difungsikan oleh pemerintah sebagai pemimpin formal, yaitu sebagai kepala Desa. Melihat peran Batin yang besar menjaga tradisi dan adat istiadat, maka Batin menjadi penting baik bagi suku Akit sendiri.

”Sebenarnya kami dulu merupakan masyarakat yang hidup di pinggir-pinggir Sungai Siak. Kami bernaung di bawah Kerajaan Siak Sri Indrapura, sampai akhirnya kami diberikan tempat tersendiri yang aman,” kata Sailan, yaitu Batin Akit Titi Akar, yang baru menduduki jabatan adat tersebut menggantikan saudaranya Anyang yang menjadi pemimpin formal, kepala desa. ”Kami adalah suku Asli daerah ini, dan sampai saat ini kami masih terus melaksanakan dan mewarisi adat-istiadat kami,” kata Anyang. Selama tiga hari di Pualau Rupert, akhirnya dari pelabuhan sederhana yang terbuat dari susunan kayu-kayu tersebut kami melangkah kaki kembali ke kapal cepat yang membawa mata kami perlahan-lahan meninggalkan Titi Akar.

Desa Hutan Panjang merupakan salah satu desa diantara 8 desa yang berada di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Desa Hutan Panjang terletak disebelah barat ibu kota kecamatan. Adapun batas-batas dari Desa Hutan Panjang adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Makeruh
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Nyirih
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Titi Akar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parit Kebumen

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, maka wilayah Desa Hutan Panjang ini mempunyai jarak:

1. Jarak dengan ibukota Provinsi 630 Km
2. Jarak dengan ibukota Kabupaten 135 Km
3. Jarak dengan ibukota Kecamatan 71 Km

4.1.2 Penduduk Desa Hutan Panjang

Penduduk yang berdomisili di Desa Hutan Panjang pada umumnya adalah orang suku Akit dan suku Jawa. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2010 jumlah penduduk Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis berjumlah 3069 jiwa yang terdiri dari 400 KK.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Hutan Panjang menurut umur.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Hutan Panjang Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	0-5 Tahun	368	11,99%
2.	6-12 Tahun	519	16,91%
3.	13-18 Tahun	404	13,16%
4.	19-23 Tahun	374	12,18%
5.	24-60 Tahun	1250	40,73%
6.	60 Tahun keatas	154	5,02%
JUMLAH		3069	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Hutan Panjang 2010

Dari tabel tersebut diatas terlihatlah bahwa keadaan penduduk Desa Hutan Panjang di lihat dari usia 24-60 tahun merupakan kelompok usia yang paling produktif dengan jumlah 1250 jiwa atau 40,73 %, dan jumlah yang paling sedikit adalah kelompok usia 60 tahun keatas dengan jumlah 154 jiwa atau 5,02% dari jumlah penduduk Desa Hutan Panjang.

4.1.3 Agama Masyarakat desa Hutan Panjang

Untuk mengetahui jumlah agama penduduk di Desa Hutan Panjang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Masyarakat Desa Hutan Pnjang Berdasarkan Agama yang Mereka Anut.

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	483	15,73%
2.	Protestan	590	19,22%
3.	Khatolik	378	12,32%
4.	Budha/Hindu	1612	52,52%
5.	Konghucu	6	0,20%
Jumlah		3069	100%

Sumber : Kantor Desa Hutan Panjang 2012

Berbicara mengenai agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Hutan Panjang, adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Hutan Panjang dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3.
Jumlah Sarana Peribadatan Masyarakat yang Ada Di Desa Hutan Panjang

No	Sarana Peribadat	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Surau	2
3.	Kelenteng	3
4.	Wihara	1
5.	Gereja	5
	Jumlah	12

Sumber : Kantor Desa Hutan Panjang 2012

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa masyarakat Didesa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis banyak yang bearagama non-islam terlihat sekali dari jumlah sarana peribadatan masyarakatnya. Cuma ada 1 bangunan Masjid dan 2 buah Surau, yang lainnya Kelenteng, Wihara dan Gereja.

4.1.4 Pendidikan Masyarakat Desa Hutan Panjang

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa Hutan Panjang menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya jimlah penduduk yang buta huruf dalam artian banyak penduduk ysng sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah orang tua yang berumur diatas 60 tahun, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Jenis Sarana Pendidikan di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	5 Unit
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1 Unit
3.	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1 Unit
Jumlah		7 Unit

Sumber : Kantor Desa Hutan Panjang 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Hutan Panjang cukuplah memadai untuk sebuah desa. Itu dapat dilihat dengan adanya lima (5) Unit Sekolah Dasar, satu (1) Unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan satu (1) Madrasah Diniyah Awaliyah. Dan dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Hutan Panjang sudah mulai kearah yang lebih baik dengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan.

4.5 Mata Pencarian Masyarakat Desa Hutan Panjang

Desa Hutan Panjang merupakan daerah yang terletak pada daerah dataran rendah yang tanahnya sangat cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat Desa Hutan Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Hutan Panjang

N0	Mata Pencaharian	Penghasilan Per Bulan
1.	Petani	Rp. 1-6 Juta
2.	Nelayan	Rp. 1-3 Juta
3.	Peternak	Rp. 3-4 Juta
4.	Pencari hasil hutan	Rp. 1-2 Juta
5.	Pengrajin	Rp.1-3 Juta
6.	Guru/Honoror	Rp. 2-3 Juta
7.	PNS	Rp. 2-4 Juta
8.	TNI/Polri	Rp. 2-4 Juta
9.	Pedagang	Rp. 2-3 Juta
10	Buruh/karyawan	Rp 1-2 Juta

Sumber : Kantor Desa Hutan Panjang 2012

Dilihat dari tabel diatas penghasilan masyarakat Desa Hutan Panjang yang mempunyai penghasilan paling tinggi adalah petani dengan penghasilan 1-6 juta per bulannya dan yang paling rendah adalah pencari hasil hutan dan buruh/karyawan dengan penghasilan 1-2 juta per bulannya. Dengan keadaan pendapatan yang demikian dapat kita lihat bahwa tingkat pendaatan untuk ukuran masyarakat dalam suatu desa sudah sangat baik.

Untuk lebih jelas tentang mata pencaharian umum masyarakat Desa Hutan Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Mata Pencaharian Penduduk Desa Hutan Panjang

N0	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase %
1.	Petani	861	28,05%
2.	Nelayan	818	26,65%
3.	Peternak	567	18,47%
4.	Pencari hasil hutan	410	13,36%
5.	Pengrajin	130	4,24%
6.	Guru/Honoror	67	2,18%
7.	PNS	10	0,33%
8.	TNI/Polri	3	0,10%
9.	Pedagang	53	1,73%
10	Buruh/karyawan	150	4,89%
Jumlah		3069	100%

Sumber : Kantor Desa Hutan Panjang 2012

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Hutan Panjang adalah bermata pencaharian petani yakni sebanyak 861 orang atau 28,05%, bekerja sebagai nelayan 818 orang atau sekitar 26,65%, bekerja sebagai peternak 567 orang atau 18,47%, sebagai pencari hasil hutan 410 orang atau 13,36%, sebagai pengrajin sebanyak 130 orang atau 4,24%, sebagai Guru/Honorere sebanyak 67 orang atau 2,18%, bekerja sebagai PNS sebanyak 10 orang atau 0,33%, sebagai TNI/Polri sebanyak 3 orang atau 0,10%, bekerja sebagai pedagang sebanyak 53 atau 1,73%, dan bekerja sebagai Buruh/karyawan sebanyak 150 atau 4,89%.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pekerjaan masyarakat Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis mayoritas sebagai petani hal ini di

karenakan bahwa masyarakat cenderung mengolah dan menggarab lahan karet dan lahan sawit dari pada memilih menjadi TNI,PNS maupun pedagang.

4.1.6 Sosial Budaya

Mengenai aspek sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari dua suku yaitu suku jawa dan suku akit. Jadi aspek social budaya cukup banyak dalam hal ini merupakan khazanah budaya daerah jawa di bawa dan dikembangkan dari turun temurun dan budaya suku akit itu sendiri di Desa Hutan Panjang.

Adapun aspek social budaya yang sangat berharga menurut khazanah budaya jawa diantaranya :

1. Wayang kulit
2. Jaran kepang/ kuda kepang
3. Ketoprak
4. Jaipong
5. Perkumpulan Wirid Yasin.

Masyarakat Desa Hutan Panjang khususnya sku jawa , telah lama membudayakan kerja sama dan persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk menghibur masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia dengan cara membaca Surat Yasin bersama-sama.

Adapun aspek social budaya suku akit yang sangat berharga diantaranya :

1. Membela kampung setahun sekali (anca)

2. Tarian selamat datang (tari persembahan)
3. Tarian maling
4. Tarian gendong.
5. Perkumpulan sosial di balai adat (gedung sosial).

Masyarakat suku akit ini budayanya tidak jauh beda dengan budaya lain cuma yang membedakan hanyalah istilah-istilah penyebutannya saja yang berbeda.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Amirudin selaku Pak Batin suku akit Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis (10 desember 2012). Masyarakat suku akit juga sering mengadakan perkumpulan sesamanya untuk membahas bermacam hal, yang sering dilakukan di balai adat (gedung sosial). Adapun fungsi dari balai adat tersebut seperti diantaranya:

1. Pernikahan (yang menikahkan Pak Batin)
2. Perkumpulan; dan
3. Pesta bela kampung (anca).

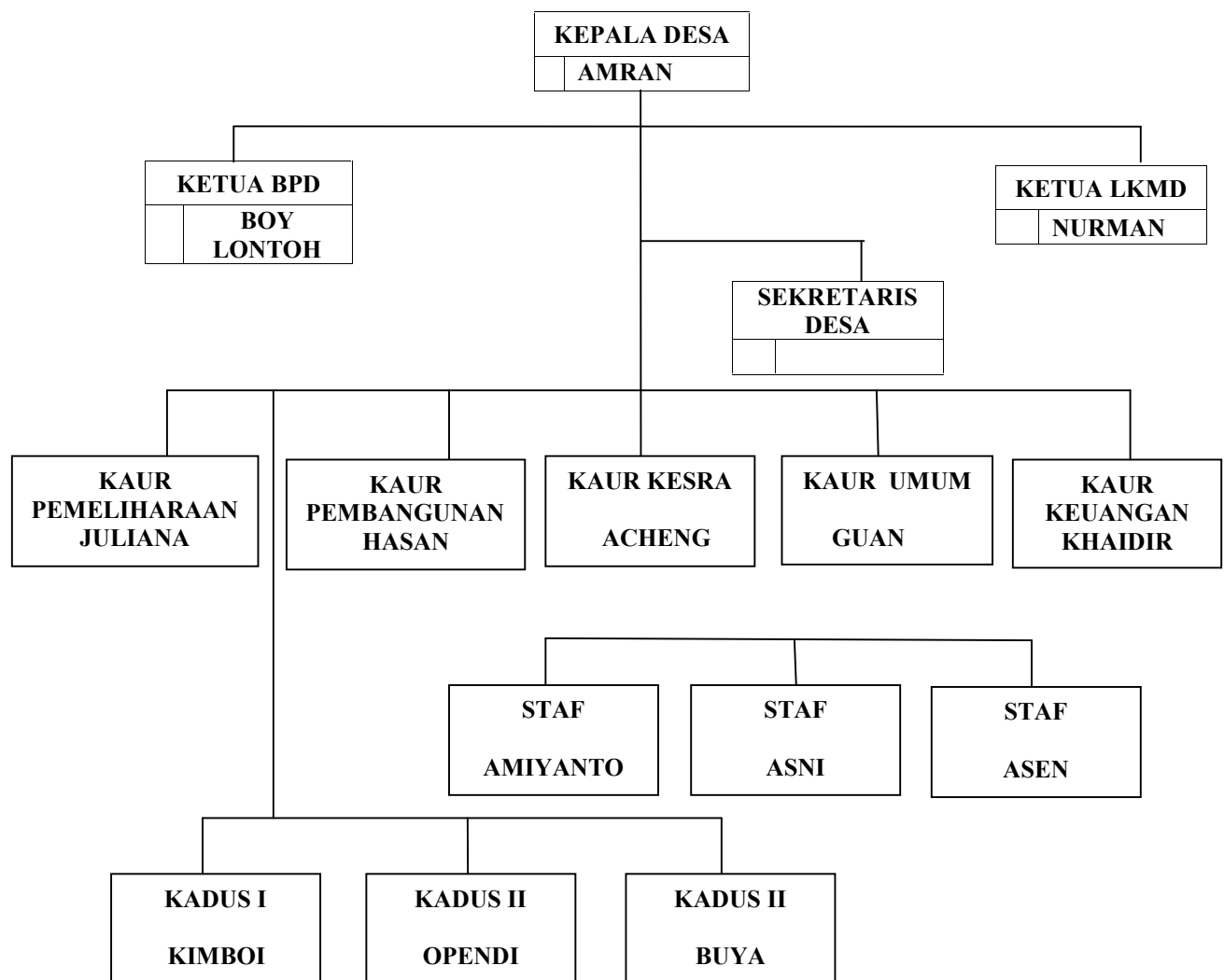
4.2 Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 204 menyebutkan “ Pemerintahan Desa dan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali yaitu satu kali masa jabatan berikutnya”. Dan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2005 tentang Desa.

4.2.1 Struktur Pemerintah Desa Hutan Panjang

Untuk lebih jelasnya tentang susunan Pemerintah Desa Hutan Panjang dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 4.1
Bagan Pemerintahan Desa Hutan Panjang



Sumber : Kantor Desa Hutan Panjang 2012

Dari bagan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang dan kewajiban dalam pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desa. Kepala Desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu menjalankan pemerintahan memberi pelayanan administrasi Kepala Desa

Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat , kearsipan, dan laporan.
- b. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa, apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas.

3. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya masing-masing.

Kepala urusan terbagi 3 yaitu ;

- a. Kaur Pembangunan
- b. Kaur Pemerintahan
- c. Kaur Umum

Ketiga Kaur tersebut mempunyai tugas dan peran masing-masing yaitu melaksanakan urusan kegiatan Pembangunan, Pemerintahan, dan kegiatan umum. Kemudian ketiga Kaur tersebut juga melaksanakan urusan administrasi dibidang tugasnya dalam membantu Sekretaris Desa.

4. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsure pembantu pelaksana Kepala Desa dalam wilayah kerja yang di tetapkan. Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Adapun tugas Kepala Dusun adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan ,pembangunan, dan kemasyarakatan , ketentraman ,serta ketertiban dalam wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Desa.
- c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Di Desa Hutan Panjang terdapat 3 Dusun yakni;

- a. Dusun 1 (Hutan Panjang)
- b. Dusun 11 (Tanah Runtuh)
- c. Dusun 111 (Sungai Kolam)

Dari uraian diatas diketahui bahwa pemerintahan yang tertinggi yang ada di Desa Hutan Panjang adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan yang paling rendah adalah Dusun. Kepala Desa berada dibawah BPD yang dibantu oleh Sekretaris Desa. Kemudian dibawah Kepala Desa terdapat 3 kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Selanjutnya kaur juga berkedudukan sebagai unsure pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya masing-masing.

Kemudian Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsure pembantu pelaksana Kepala Desa dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dalam wilayah kerjanya yang kemudian dibantu oleh RW dan RT yang ada.

4.2.2 Visi dan Misi Desa Hutan Panjang

Ada pun visi Misi Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Visi Desa Hutan panjang

Menjadikan Kantor Desa Hutan Panjang sebagai instansi yang handal dan professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Misi Desa Hutan Panjang

1. Menyiapkan aparatur desa yang professional, handal, ramah dan cakap.
2. Meningkatkan kualitas aparatur desa yang berorientasi kedepan dan bermasyarakat.

3. Melaksanakan pembinaan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik bagi kenyamanan pelayanan untuk masyarakat.
5. Melestarikan adat budaya yang mengedepankan kemajuan daerah Kabupaten bengkalis pada Desa Hutan Panjang khususnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Identitas Responden

Untuk mengetahui hasil penelitian yang dilakukan maka terlebih dahulu penulis memaparkan beberapa identitas responden sebagai sampel yang diambil berdasarkan jenis kelamin, tingkat umur, tingkat pendidikan dan lama berdomisili responden, yaitu sebagai berikut :

5.1.1 Jenis Kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden sebagai sampel yang diambil berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Jenis Kelamin Responden Yang Diambil Di Desa Hutan Panjang

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	45	58,44%
2	Perempuan	32	41,56%
	Jumlah	77	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 77 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 45 responden laki-laki atau 58,44%, sedangkan perempuan sebanyak 32 responden perempuan atau 41,56%.

Jadi jumlah keseluruhan responden yang dijadikan sampel dari Desa Hutan Panjang adalah sebanyak 77 orang.

Berdasarkan data yang saya peroleh dari Kantor Kepala Desa disaat turun kelapangan kemaren tanggal 23 November 2012, jumlah penduduk Desa Hutan Panjang berdasarkan jenis kelamin, adapun diantaranya jumlah jenis kelamin laki-laki keseluruhannya itu sebanyak 1615 Jiwa, sedangkan jumlah keseluruhan jenis kelamin perempuan Didesa Hutan Panjang itu sebanyak 1454 Jiwa. Didesa Hutan Panjang terdiri dari dua suku, yaitu suku akit dan suku jawa, yang telah memenuhi syarat untuk memilih calon Kepala Desa dari suku akit jumlah keseluruhannya 343 penduduk sedangkan suku jawa 214 penduduk, Dari jumlah penduduk Desa Hutan panjang tersebut penulis mengambil sampel sebanyak 77 orang.

5.1.2 Umur Responden

Umur sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil setiap keputusan, berfikir dan bertindak. Supaya apa yang telah dilakukannya tidak merugikan dirinya dan orang lain, tingkat umur juga sering dijadikan tolak ukur kedewasaan dan kematangan seseorang. Umur sangatlah berpengaruh dalam menentukan pilihan, termasuk dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Hutan Panjang. Untuk mengetahui tingkat umur responden juga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2
Tingkat Umur Responden Yang Diambil di Desa Hutan Panjang

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	17-25 Tahun	24	31,17%
2	26-34 Tahun	21	27,27%
3	35-43 Tahun	19	24,67%
4	44 Tahun keatas	13	16,88%
	Jumlah	77	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak adalah pada umur 17-25 tahun yaitu sebanyak 24 responden atau 31,17%. Kemudian selanjutnya umur 26-34 tahun yaitu sebanyak 21 responden atau 27,27%. Kemudian umur 35-43 tahun yaitu sebanyak 19 responden atau 24,67%. Dan terakhir terlihat tingkat umur responden yang paling sedikit adalah pada umur 44 tahun keatas yaitu sebanyak 13 responden atau 16,88%.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam menentukan keputusan apa yang terbaik untuk dirinya dan apa yang terbaik untuk masyarakat sekitarnya.

5.1.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia guna menambah pengetahuan, meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam rangka meningkatkan profesionalisme serta produktivitas kerja.

Pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan pendidikan sumber daya manusianya akan berkualitas. Pendidikan merupakan usaha untuk membina kepribadian dan untuk mengembangkan kemampuan manusia ke dunia jasmaniah dan rohaniah yang berlangsung seumur hidup didalam maupun diluar sekolah.

Untuk mengetahui gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3
Tingkat Pendidikan Responden Yang Diambil di Desa Hutan Panjang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Tamat SD	14	18,18%
2	SD	21	27,27%
3	SMP / Sederajat	28	36,36%
4	SLTA / sederajat	11	14,28%
5	Perguruan Tinggi	3	3,90%
	Jumlah	77	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah 77 responden dengan berbagai tingkatan pendidikan yaitu, yang mempunyai latar belakang tidak tamat SD sebanyak 14 responden (18,18%), tamat SD sebanyak 21 responden (27,27%), tamatan SMP sebanyak 28 responden (36,36%), tamatan SLTA 11 responden (14,28%), dan yang mempunyai latar belakang perguruan tinggi sebanyak 3 responden (3,90%).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat pendidikan responden sudah dikatakan baik karena mayoritas responden paling

tidak sudah mengenyam pendidikan di SD, meskipun ada juga sebagian kecil yang tidak tamat SD. Namun demikian variasi tingkat pendidikan responden sudah cukup baik karena mencakup seluruh tingkat pendidikan yakni mulai dari tingkat SD, SMP, SLTA dan ada juga yang perguruan tinggi.

1.1.4 Pekerjaan Responden

Untuk mengetahui pekerjaan responden di Desa Hutan Panjang yang menjadi sampel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4
Tabel Pekerjaan Responden di Desa Hutan Panjang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani/ pekebun	26	31,17%
2	Peternak	17	22,07%
3	Pelaut/ nelayan	24	33,77%
4	Pedagang	10	12,98%
	Jumlah	77	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas pekerja responden adalah petani/ pekebun dengan jumlah 26 responden atau (31,17%), sedangkan peternak dengan jumlah 17 responden atau (20,07%), kemudian pelaut dengan jumlah 24 responden atau (33,77%) dan pedagang dengan jumlah 10 responden atau (12,98%).

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa para responden yang berdomisili di Desa Hutan Panjang mayoritas bekerja sebagai petani/pekebun. Disini mereka sudah mulai berbaur, sehingga mereka tidak lagi

mengoptimalkan hasil alam seperti mencari hasil hutan, disini juga mereka sudah mulai berkembang terlihat dari table diatas bahwa sbagian dari masyarakat suku akit sudah ada yang bermata pencaharian seperti nelayan, peternak, dan pedagang.

5.2 Partisipasi Masyarakat Suku Akit dalam Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sebagai salah satu wujud dari otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, kebebasan masyarakat untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan kepala desa sebagai pemimpin masyarakat sekaligus orang yang memegang kekuasaan pada tingkat desa.

Keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan panitia pemilihan kepala desa, agar nantinya dalam pemilihan kepala desa bisa berjalan dengan lancar. Dalam hal ini BPD memanggil para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Hutan Panjang untuk membicarakan tentang akan diadakannya pemilihan kepala desa, sekaligus membentuk panitia pemilihan kepala desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 pada pasal 47 ayat 1 yang berbunyi : Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsure perangkat desa, pengurus lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam PERDA No 4 tahun 2007 tentang mekanisme pemilihan kepala desa, adapun sebagai langkah awal yang dipersiapkan adalah pembentukan panitia pemilihan kepala desa.

5.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberian suara

Dalam pendaftaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, bahwa yang dapat memilih atau yang berhak memilih adalah masyarakat Desa Hutan Panjang yang sudah berumur 17 tahun keatas atau yang sudah pernah menikah, yang sudah diakui keberadaannya sebagai masyarakat Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilih Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Demikian pula di Desa Hutan Panjang. Hal ini dapat kita lihat dari tabel berikut :

Tabel 5.5
Jawaban Responden. Mengenai Warga yang Tidak Mendapatkan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa

No	Jawaban Responden	F	%
1	Sering	15	19,48
2	Jarang	42	54,54
3	Tidak pernah	20	25,97
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas, tentang jawaban responden yang menjawab sering sebanyak 15 responden atau 19,48%, yang menjawab jarang sebanyak 42 responden atau 54,54 %, serta yang menjawab tidak pernah sebanyak 20 responden atau 25,97%.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa responden, mengapa mereka tidak mendapatkan hak pilih karena, yang bersangkutan tidak ada dirumah, sebagian mereka ada yang lagi bekerja dikebun, ada yang bepergian dan ada juga yang lagi sibuk bekerja diluar daerah, sehingga pihak panitia sulit dan tidak dapat memberikan undangan pemilihan secara merata, dan panitia juga tidak ada usaha lagi untuk mengulangi atau mendatangkan kembali kerumah warga-warga yang masih belum mendapatkan undangan pemilihan Kepala Desa tersebut. Mungkin panitia merasa merepotkan, dan disini panitia juga kurang bersosialisasi dengan warga atau masyarakat Desa Hutan Panjang.

Setelah mengetahui penjelasan melalui uraian dan tabel diatas, apakah saat pencontrengan masyarakat menggunakan hak suaranya. Semua ini dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 5.6
Jawaban Responden , Apakah Semua Masyarakat Desa Hutan Panjang Menggunakan Hak Suaranya.

No	Jawaban Responden	F	%
1	Baik	20	25,97
2	Kurang baik	30	38,96
3	Tidak baik	27	35,06
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas mengenai jawaban responden yang menjawab dengan jawaban baik sebanyak 20 reponden atau 25,97%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 30 responden atau 38,96% serta yang menjawab tidak baik sebanyak 30 atau 35,06%.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Amirudin selaku Pak Batin, tentang permasalahan yang ada, yaitu mengenai masyarakat suku akit yang banyak tidak menggunakan hak suara, menurutnya mereka yang tidak menggunakan hak suara itu, karena mereka mempunyai alasan tersendiri, salah satunya mereka tidak dorongan atau motivasi dari siapapun, calon kepala desa saja tidak ada melakukan sosialisasi secara pribadi kepada masyarakat, untuk memberikan pencerahan dan motivasi, sehingga bagi mereka yang kurang paham akan dunia politik mereka tidak mau membuang waktunya untuk menghadiri pemilihan suara tersebut.

Ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia tidak akan hadir ke bilik suara, begitu juga sebaliknya. Disamping itu ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara financial dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Menurut Susan Welch (Efriza 2012:534)

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua panitia pemilihan kepala desa mereka menjawab mengapa masyarakat suku akit banyak yang tidak hadir pada saat pemilihan, itu disebabkan beberapa hal :

1. Karena mereka sibuk dengan pekerjaannya
2. Pada saat pemilihan mereka sedang beda diluar daerah.
3. Karena mereka kurang partisipasi sehingga tidak mau menghadiri
4. Karena harus bepergian, pada saat pemilihan.
5. Banyak hal yang lebih penting yang tidak bisa ditinggalkan.

Dari beberapa alasan tersebut dapat diketahui sejauh mana partisipasi masyarakat untuk ikut menghadiri pada saat pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang berlangsung.

Dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang, masyarakat harus mengetahui bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa agar mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kenyataan.

Menurut Muhammad Asfar (Efriza 2012:541), golput disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

1. Ketidakhadiran diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada system politik, berbeda dengan kehadiran yang sering diinterpretasikan sebagai bentuk “loyalitas“ atau kepercayaan pada system politik yang ada.

2. Ketidakhadiran pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi tersebut menyiratkan kondisi bahwa, ketidakhadiran pemilih dimaknakan sebagai indikator lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.
3. Ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat.

Kemudian bagaimana pula dengan proses pencontrengan Kepala Desa Hutan Panjang tahun 2010, hal ini dapat kita lihat jelas dari table berikut :

Tabel 5.7
Jawaban Responden , Mengenai Proses Pencontrengan Kepala Desa Hutan Panjang Tahun 2010

No	Jawaban Responden	F	%
1	Baik	20	25,97
2	Kurang baik	32	41,55
3	Tidak baik	25	32,47
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui melalui jawaban responden yang mengatakan baik dalam proses pencontrengan Kepala Desa Hutan Panjang tahun 2010 sebanyak 20 responden atau 25,97%, sedangkan yang mengatakan kurang baik sebanyak 32 responden atau 41,55%, dan yang menjawab tidak baik sebanyak 25 responden atau 32,47% .

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Hutan Panjang itu sendiri, yaitu BapK Amran, ia mengatakan bagaimana mau dikatakan baik, jikalau partisipasinya kurang menonjol, diundang rapat hanya sebagian yang hadir, di

ajak dalam kegiatan kampanye juga tidak banyak yang hadir, mereka lebih memilih melakukan kegiatan yang lain disbanding hadir dalam ajakan tersebut. Bagi mereka siapapun yang menjadi pemimpin atau menjadi Kepala Desa nantinya itulah Kepala Desa kami. Sehingga sulit diajak untuk berpartisipasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan control terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, control masyarakat terhadap kebijakan publik adalah salah satu wujud dari tatanan demokrasi yang ada di Desa Hutan Panjang.

5.2.2 Partisipasi masyarakat dalam suatu diskusi politik pencalonan Kepala Desa

Sebelum kepala desa diangkat, terlebih dahulu harus dipilih oleh masyarakat desa setempat. Disini diberikan kebebasan kepada masyarakat, siapa yang mau atau ingin mencalonkan dirinya sebagai calon kepala desa. Dan bagi siapa yang memenuhi persyaratan maka dialah yang berhak tampil sebagai calon kepala desa pada saat pemilihan nanti.

Selanjutnya calon-calon tersebut diteruskan ke Bupati dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Permohonan pencalonan kepala desa diajukan secara tertulis kepada bupati melalui panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Panitia pencalonan meneliti persyaratan administrasi dari tiap-tiap calon kepala desa.

3. Panitia pengawas setelah menerima bakal calon kepala desa tersebut mengadakan penelitian persyaratan dan hasilnya dikirim kepada ketua panitia peneliti dan penguji.
4. Bakal calon kepala desa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan dalam keputusan ditetapkan sebagai calon kepala desa.
5. Calon kepala desa yang berhak untuk ikut dalam pemilihan adalah mereka yang sudah ditetapkan dengan keputusan bupati.

Table 5.8
Jawaban Responden, Tentang Keikutsertaan Masyarakat dalam Diskusi
Politik Terkait Pencalonan Kepala Desa

No	Jawaban Responden	F	%
1	Sering	15	19,48
2	Jarang	30	38,96
3	Tidak Pernah	32	41,55
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat jelas responden yang menjawab sering keikutsertaan masyarakat dalam diskusi politik sebanyak 15 responden atau 19,48%, dan yang menjawab jarang sebanyak 30 responden 38,96% serta yang menjawab tidak pernah sebanyak 32 responden atau 41,55%.

Dari fakta yang ada, masyarakat banyak yang tidak menghadiri karena mereka kurang mengetahui akan dunia politik, karena tidak adanya yang bersosialisasi langsung dengan mereka untuk memberikan pencerahan pemikiran

terhadap mereka, sehingga mereka enggan untuk menghadiri dalam diskusi politik tersebut.

Kemudian bagaimana pula dengan panitia pemilihan apakah mereka pernah mengundang masyarakat dalam keikutsertaan diskusi untuk membahas kegiatan pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 5.9
Jawaban Responden. Apakah Panitia Pemilihan Pernah Mengundang Masyarakat Untuk Ikut Berdiskusi dalam Pemilihan Kepala Desa

No	Jawaban Responden	F	%
1	Sering	10	12,99
2	Jarang	35	45,45
3	Tidak pernah	32	41,55
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa panitia pemilihan kepala desa bersosialisasi dengan masyarakat, terlihat yang menjawab sering sebanyak 10 responden atau 12,99%, ada juga yang menjawab jarang sebanyak 35 atau 45,45%, dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 32 responden atau 41,55% .

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden, mengenai sosialisasi panitia terhadap masyarakat itu , mereka mengatakan sangat jarang karena pihak panitia enggan mendekati warga, mungkin menurutnya, semua itu membuang waktu.

5.2.3 Partisipasi dalam kampanye

Menurut Lilliker (Efriza 2012:470) mengatakan bahwa kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua konsestan, baik

parpol maupun perseorangan, untuk memaparkan program-program kerjadan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan.

Adapun tujuan kampanye menurut pfau dan parrot (Efriza 2012:470) apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan, sikap, dan prilaku. Ketiga aspek ini bersifat saling terkait dan merupakan sasaran pengaruh yang mesti dicapai secara bertahap agar satu kondisi perubahan dapat tercipta diantaranya sebagai berikut :

1. *Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif.* Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.
2. *Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap.* Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
3. *Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukankan untuk mengubah prilaku khalayak secara kongkrit dan terukur.* Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Desa Hutan Panjang, kebanyakan responden mengatakan bahwa mereka tidak datang

ketempat kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa dan tim sukses, karena sibuk dengan pekerjaan dan ada juga yang bepergian.

Hal ini dilihat dari data tanggapan responden yang memberikan indikasi bahwa mereka banyak tidak hadir saat kampanye calon kepala desa, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 5.10
Jawaban Responden, Masyarakat Tentang Kehadiran Mereka Pada Saat Kampanye Calon Kepala Desa.

No	Jawaban Responden	F	%
1	Baik	12	15,58
2	Kurang baik	35	45,45
3	Tidak baik	30	38,96
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas. Menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian di Desa Hutan Panjang, banyak yang tidak hadir pada saat kampanye calon kepala desa. Adapun mereka yang mengatakan baik sebanyak 12 responden atau 15,58%, yang menjawab kurang baik sebanyak 35 responden atau 45,45% serta yang menjawab tidak baik sebanyak 30 responden atau 38,96%.

Berdasarkan wawancara melalui beberapa responden masyarakat yang tidak hadir pada saat kampanye calon Kepala Desa Hutan Panjang, kebanyakan dari mereka menjawab disebabkan pada saat kampanye mereka tidak ada waktu untuk datang ketempat lokasi kampanye, karena ada urusan yang lebih penting.

Ajakan yang bersifat persuasive yang dilakukan pada waktu berkampanye pemilihan sudah merupakan suatu bentuk mobilisasi. Kehadiran masyarakat dalam kampanye yang dimobilisasi atau disebabkan dorongan orang lain untuk diminta datang pada saat kampanye, hal ini bisa disebabkan hubungan keluarga, suku ataupun hubungan teman dan sebagainya.

Panitia pemilihan kepala desa memberikan waktu kepada calon kepala desa untuk berkampanye, tiap-tiap calon kepala desa diberikan waktu 21 hari sebelum pemilihan.

Tabel 5.11
Jawaban Responden, Tentang Pelaksanaan Kampanye yang Dilakukan
Setiap Calon Kepala Desa Hutan Panjang.

No	Jawaban Responden	F	%
1	Baik	37	48,05
2	Kurang baik	20	25,97
3	Tidak baik	20	25,97
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa responden yang menjawab baik tentang pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa sebanyak 37 responden atau 48,05%, yang menjawab cukup baik tentang pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa sebanyak 20 responden atau 25,97% dan yang menjawab tidak baik sebanyak 20 atau 25,97% .

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa yang menjawab kurang baik itu sangat banyak, semua ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari calon kepala desa terhadap warga, sehingga mereka

tidak ada dorongan atau tidak ada daya tarik untuk datang atau menghadiri kegiatan kampanye tersebut. Yang dilakukan oleh calon Kepala Desa Hutan Panjang.

5.2.4 Partisipasi Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan

Di dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang itu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat selain itu juga diharapkan supaya masyarakat ikut bergabung dalam kelompok kepentingan, supaya masyarakat menyadari akan adanya demokrasi. Demi menjunjung hak asasi manusia untuk bisa menentukan kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Karena satu suara itu sangat menentukan masa depan bersama.

Tabel 5.12
Jawaban Responden, Tentang Keikutsertaan Masyarakat Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan.

No	Jawaban Responden	F	%
1	Sering	12	15,58
2	Jarang	35	45,45
3	Tidak Pernah	30	38,96
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa masyarakat yang dijadikan sampel sedikit yang menjawab sering yaitu sebanyak 12 responden atau 15,58%, sedangkan yang menjawab jarang itu sebanyak 35 responden atau 45,45%, dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 30 responden atau 38,96%. Jadi terlihat sekali banyak yang tidak ikut serta bergabung dalam kelompok kepentingan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa responden, alasan mereka tidak adanya keikutsertaan dalam membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan ini semua dikarenakan, mereka merasa sulit dan tidak nyambung (searah) untuk bergabung sementara mereka sendiri tidak mengetahui tentang apa itu dunia politik.

Selain keadaan masyarakat yang seperti itu, bagaimana pula dengan calon kepala desa. Disini juga kita dapat menilai bagaimana pula sosialisasi calon kepala desa untuk memenangkan salah satu calon. sebagaimana dilihat dari table berikut :

Tabel 5.13
Jawaban Responden, Tentang Pernah atau Tidak Diajak Untuk Menjadi Tim Sukses Oleh Calon Kepala Desa.

No	Jawaban Responden	F	%
1	Sering	7	9,09
2	Jarang	40	51,94
3	Tidak pernah	30	38,96
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel ini, kita dapat menilai bahwa calon kepala desa kurang bersosialisasi dengan masyarakat, disini hanya sedikit yang menjawab sering diajak jadi Tim sukses yaitu sebanyak 7 responden atau 9,09%, sedangkan yang menjawab jarang sebanyak 40 responden atau 51,94%, dan yang menjawab tidak pernah itu sebanyak 30 responden atau 38,96% .

Disini terlihat jelas dari uraian diatas bahwa calon kepala desa kurang adanya sosialisasi pribadi terhadap warga atas pencalonannya. Sehingga

masyarakat merasa tidak dibutuhkan dalam keikutsertaan untuk mengsucceskan salah satu dari calon kepala desa bahkan ada diantara masyarakat yang tidak mengenali tokoh atau sosok orang yang ingin mencalonkan dirinya untuk menjadi calon kepala Desa Hutan Panjang tersebut.

5.2.5 Partisipasi dalam Komunikasi Individual dengan Pejabat Politik dan Administratif.

Didalam pencalonan para calon harus bisa melakukan sosialisasi supaya saat kampanye masyarakat bias berpartisipasi dengan baik tanpa ada unsure paksaan, ini tidak hanya waktu kampanye yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat tetapi juga pada saat pemilihan, karena satu suara sangat berharga dan menentukan sekali bagai mana nasib suatu desa kedepannya.

Tabel 5.14
Jawaban Responden, Tentang Apakah Pernah Calon Kepala Desa Melakukan Sosialisasi Pribadi Kepada Masyarakat Desa Hutan Panjang.

No	Jawaban Responden	F	%
1	Sering	25	32,46
2	Jarang	37	48,05
3	Tidak pernah	15	19,48
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas, jelas tanggapan atau jawan masyarakat yang menyatakan bahwa calon kepala desa sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencalonannya menjadi Kepala Desa Hutan Panjang sebanyak 25 responden atau 32,46%, sedangkan yang menjawab tidak pernah sebanyak 37 responden atau 48,05%, dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 15 responden atau 19,48%.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa calon kepala desa dari jumlah jawaban responden banyak menyatakan bahwa calon kepala desa itu tidak ada atau tidak sering melakukan ajakan kepada masyarakat Desa Hutan Panjang untuk memilihnya.

Setelah mengetahui dari hasil tabel diatas tentang sosialisasi calon Kepala Desa. Sekarang bagaimana pula dengan panitia pemilihan apakah mereka mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini dapat kita lihat dari table berikut:

Tabel 5.15
Jawaban Responden, Apakah Panitia Pemilihan Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

No	Jawaban Responden	F	%
1	Sering	17	22,08
2	Jarang	32	41,55
3	Sangat jarang	28	36,36
	Jumlah	77	100,00

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas, tentang sosialisasi panitia pemilihan kepala desa kepada masyarakat menunjukkan, bahwa hanya sedikit masyarakat yang menjawab sering yaitu sebanyak 17 responden atau 22,08%, sedangkan yang menjawab jarang itu sebanyak 32 responden atau 41,55%, dan sebanyak 28 responden atau 36,36% yang menjawab tidak pernah akan sosialisasi yang dilakukan panitia pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dari pihak panitia itu sangat kurang sekali akan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak

dibutuhkan atau dihargai sama sekali. untuk mengetahui hasil dari pemberian suara dalam pemilihan kepala Desa Hutan Panjang keseluruhannya, dapat kita lihat melalui tabel berikut.

Tabel 5.16
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Pemberian Suara

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Terdapat warga yang tidak mendapatkan hak pilih.	15	42	20	100%
2	Penggunaan hak suara, oleh masyarakat suku akit	20	30	27	100%
3	Proses pencontrengan saat pemilihan	20	32	25	100%
Jumlah		55	104	72	100%
Rata-rata		18,33	34,67	24	77
Jumlah Rata-Rata		23,80	45,03	31,17	100

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari table rekapitulasi diatas, dapat dilihat bahwa dalam pemberian suara dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert, terdapat yang menjawab baik sebanyak 55 responden, dan yang menjawab kurang baik itu sebanyak 104 responden, yang menjawab kurang baik sebanyak 72 responden.

Dalam pemberian suara dilihat dari uraian tabel diatas, menyatakan bahwa, kurangnya masyarakat suku akit untuk menghadiri dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang, alasan masyarakat tidak menghadiri itu dikarenakan : ada sebagian mereka yang sedang berada diluar daerah, ada hal penting yang tidak bisa

ditinggalkan, ada pekerjaan, dan ada juga yang harus berpergian pada hari pemilihan itu berlangsung.

Tabel 5.17
Rekapitulasi Jawaban Responden, Mengenai Keikutsertaan dalam Diskusi Politik

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Ajakan dari panitia kepada masyarakat untuk ikut serta dalam suatu diskusi politik	15	30	32	100%
2	Partisipasi masyarakat dalam suatu diskusi politik	10	35	32	100%
Jumlah		25	65	64	100%
Rata-rata		12,5	32,5	32	77
Jumlah Rata-Rata		16,23	42,21	41,56	100

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari table rekapitulasi diatas, terlihat jelas menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam suatu diskusi politik sebanyak 25 responden yang menjawab baik, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 65 responden, sedangkan yang menjawab tidak baik sebanyak 64 responden, berarti disini keliatan sekali akan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi sehingga banyak menjawab kurang baik.

Dari uraian diatas terlihat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri suatu diskusi politik, itu dikarenakan tidak adanya unsur ajakan dari calon kepala desa maupun dari panitia-panitia pemilihan kepala desa, sehingga

masyarakat enggan untuk bergabung untuk menghadiri suatu diskusi politik. Kemudian bagaimana pula dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berkampanye, disini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.18
Rekapitulasi Jawaban Responden, Mengenai Keikutsertaan dalam Kampanye

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Partisipasi masyarakat pada saat kampanye.	12	35	30	100%
2	Proses pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa.	37	20	20	100%
Jumlah		49	55	50	100%
Rata-rata		24,5	27,5	25	77
Jumlah Rata-Rata		31,81	35,71	32,47	100

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari table rekapitulasi diatas, menunjukkan bahwa sedikit responden yang menjawab baik dilihat dari partisipasi kampanye itu sendiri sebanyak 49 responden, sedangkan yang menjawab kurang baik dari hasil kampanye tersebut sebanyak 55 responden, dan yang menjawab tidak baik itu sebanyak 50 responden.

Dalam berkampanye, calon kepala desa itu harus membuat daya tarik supaya masyarakat mau ikut menghadiri kampanye yang dilakukan olehnya, dan juga mau ikut dalam pemilihan yang akan berlangsung nanatinhya. Semua itu, harus adanya pendekatan yaitu bersosialisasi kepadamasyarakat. Supaya

masyarakat bisa menilai dan berkesimpulan untuk memilih salah satu calon Kepala Desa yang ikut mencalonkan menjadi Kepala Desa Hutan Panjang. Kemudian bagaimana pula dengan keikutsertaan masyarakat dalam bergabung dengan kelompok kepentingan, untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.19
Rekapitulasi Jawaban Responden, Mengenai Keikutsertaan Masyarakat Untuk Bergabung dalam Kelompok Kepentingan

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Apakah masyarakat pernah bergabung dalam suatu kelompok untuk memenangkan salah satu calon kepala desa	12	35	30	100%
2	Apakah pernah diajak untuk menjadi Tim Sukses	7	40	30	100%
Jumlah		19	75	60	100%
Rata-rata		9,5	37,5	30	77
Jumlah Rata-Rata		12,34	48,70	38,96	100

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas, tergambar jelas bahwa responden yang menjawab baik dalam bergabung dengan kelompok kepentingan sebanyak 19 responden, sedangkan yang menjawab kurang baik sebanyak 75 responden dan terdapat 60 responden yang menjawab tidak baik.

Jika dilihat dari keikutsertaan masyarakat untuk bergabung dengan kelompok kepentingan itu sangat kurang sekali, karena kurangnya kesadaran

mereka dalam berpartisipasi apalagi ikut serta dalam kelompok politik. Kemudian bagaimana pula dengan keikutsertaan masyarakat dalam berkomunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi, dapat kita lihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.20
Rekapitulasi Jawaban Responden, Mengenai Keikutsertaan Komunikasi Individual dengan Pejabat Politik dan Administratif

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Sosialisasi pribadi calon kepala desa kepada warga.	25	37	15	100%
2	Sosialisasi panitia kepada warga terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa.	17	28	32	100%
Jumlah		42	65	47	100%
Rata-rata		21	32,5	23,5	77
Jumlah Rata-Rata		27,27	42,21	30,52	100

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas, dapat dilihat jumlah responden yang menjawab baik tentang komunikasi individual terhadap warga, itu sebanyak 42 responden, yang menjawab kurang baik sebanyak 65 responden, dan sebanyak 47 responden yang menjawab tidak baik.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi calon kepala Desa Hutan Panjang dengan masyarakat, sehingga masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi apapun demi pemilihan Kepala Desa, bagi masyarakat siapapun

yang terpilih menjadi Kepala Desa nantinya itulah Kepala Desa kami. Ternyata disini tidak hanya calon Kepala Desa yang kurang bersosialisasi, tetapi juga panitia –panitia Pemilihan Kepala Desa juga seperti itu, sehingga masyarakat tidak ada dorongan atau motivasi untuk memilih salah satu dari calon Kepala Desa Hutan Panjang tersebut. Mereka juga tidak ada ketertarikan untuk menghadiri ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka lebih memilih untuk tidak datang karena mereka tidak merasa dirugikan, mereka juga bisa bekerja demi mencari kebutuhan hidup mereka.

Untuk melihat hasil keseluruhan dari semua indikator yang ada , disini dapat kita lihat pada tabel rekapitulasi keseluruhan, tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2010. Adapun table rekapitulasi keseluruhan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 5.21
Rekapitulasi Keseluruhan, Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Suku
Akit Dalam Pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert
Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	Tanggapan Responden			Perse ntase (%)
		Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Partisipasi masyarakat dalam pemberian suara dalam pemilihan kepala desa	18,33	34,67	24	100%
2	Partisipasi masyarakat dalam diskusi politik terkait pencalonan kepala desa	12,5	32,5	32	100%
3	Partisipasi masyarakat dalam kampanye calon kepala desa.	24,5	27,5	25	100%
4	Partisipasi membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.	9,5	37,5	30	100%
5	Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	21	32,5	23,5	100%
Jumlah		85,83	164,67	134,5	385
Rata-rata		17,17	32,93	26,9	77
Jumlah Rata-Rata		22,29%	42,77%	34,94%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, dari 77 sampel yang dijadikan responden yang mengatakan bahwa berdasarkan indikator-indikator dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis menyatakan “ kurang Baik “ untuk lebih jelas dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

1. Tanggapan responden mengenai partisipasi politik masyarakat suku akit dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis yang menyatakan baik sebanyak 22,29%
2. Tanggapan responden mengenai partisipasi politik masyarakat suku akit dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis yang menyatakan kurang baik sebanyak 42,77%
3. Tanggapan responden mengenai partisipasi politik masyarakat suku akit dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis yang menyatakan tidak baik sebanyak 34,94%

Dari hasil rekapitulasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat suku akit dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dikatakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa karena kurangnya sosialisasi masyarakat dan panitia pemilihan.serta kurangnya partisipasi terhadap indikator-indikator yang ada, yaitu: partisipasi pemberian suara, partisipasi dalam suatu diskusi politik, partisipasi dalam kampanye, partisipasi membentuk dan bergabung dalam

kelompok kepentingan, dan partisipasi dalam berkomunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative.

Kelima indikator diatas saling ketergantungan dan berkaitan serta sangat menentukan baik atau tidaknya hasil pemilihan Kepala Desa yang akan dicapai.dikatakan demikian karna tanpa indikator-indikator tersebut maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis tidak akan bisa terselenggara.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat suku akit dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang dikatakan kurang partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa, itu dikarenakan mereka tidak mengetahui sedikitpun tentang dunia politik, karena tidak adanya pencerahan pikiran mereka tentang kehidupan politik, kepala Desa juga kurang adanya sosialisasi pribadi kepada masyarakat. Sehingga mereka enggan untuk hadir dalam pemilihan Kepala Desa Hutan Panjang, dan ada juga sebagian mengatakan kenapa saat pemilihan mereka juga tidak bisa hadir itu karena mereka tidak mau meninggalkan pekerjaan mereka dan ada juga yang bepergian, bagi mereka siapapun yang terpilih menjadi kepala Desa Hutan Panjang nantinya itulah kepala Desa kami, dan kami tidak merasa dirugikan, dan disisi lain juga kurangnya sosialisasi dari panitia pemilihan, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pemberian suara dikategorikan kurang baik, karena 45,55% dari jumlah responden menghadiri .

2. Sedangkan mengenai partisipasi menghadiri dalam suatu diskusi politik dikatakan kurang baik, karena 40,54% yang menghadiri pada saat diadakan diskusi politik.
3. Mengenai partisipasi masyarakat untuk menghadiri kampanye dikatakan kurang baik, karena 60% sering hadir pada saat kampanye calon kepala desa.
4. Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat dalam bergabung dengan kelompok kepentingan bisa dikatakan kurang baik, karena hanya 30% yang ikut serta untuk bergabung.
5. Jika dilihat dari partisipasi masyarakat di dalam komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi itu bisa dikatakan kurang baik juga, karena hanya 36,45% yang punya kesadaran sendiri untuk berpartisipasi dengan pejabat politik dan administrasi.

6.2 Saran

1. kepada pembaca hasil penelitian ini penulis harapkan, jika memilih pemimpin hendaknya, pilihlah berdasarkan kesadaran sendiri tanpa digerakkan oleh orang lain, yang berupa paksaan atau dengan menggunakan rangsangan materi.
2. diharapkan pada masyarakat Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, jika memilih seorang pemimpin hendaklah berdasarkan hati nurani tanpa ada unsure paksaan dari manapun.

3. diharapkan bagi yang ingin menjadi calon kepala desa, hendaknya jadilah pemimpin yang benar-benar memimpin menurut konsep islam untuk membawa nasib suatu desa kedepannya agar lebih mapan lagi, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.
4. bagi yang menjadi panitia, laksanakanlah tugas sesuai peraturan yang ada dan harus bersifat demokratis, tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Sahid Gatara, Fh, M.Si.2008, *Ilmu Politik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Alfian. 1986, *Perkembangan Ilmu Politik.*, Bandung, Remaja Karya
- Al-Qur'an, *Berbuat Baik dan Adil*, Surah Al-Mumtahanah ayat Kedelapan.
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian*. Jakarta , Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam.2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dawan Raharjo,2000, *Pengantar Politik*.jakarta,PT. Raja Grafindo
- Efriza, 2012, *Political Explore*. Bandung, Alfabeta.
- Hanif Nurholis, 20011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga.
- Hendry B. Mayor, 2003, *Sistem Politik Demokrasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Husen Umar .2005, *Prosedur Penelitian* , Jakarta, Rineka Cipta.
- Hutington , P, Samuel. (terjemahan Sahat Simamora) 1990, *Partisipasi Pada Negara Berkembang*, Jakarta, Pt. Rieka Cipta
- Kartini Kartono. 2005,*Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta PT.Raja Grafindo
- Maran Rafcal Raga. 2001,*Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, Renika Cipta
- Myron Weiner, 2001,*Pegerakan Politik di Indonesia*. Jakarta, PT.Rieka Cipta.
- Pasaribu Simanjuntak ,1992, *Pengembangan Politik*,Bandung, Renika Cipta
- Subakti , Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia
- Sugiono.2005, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.12 Tahun 2007. Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2007, tentang Partisipasi Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Bandung .Fokus Media .2006

Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Demokrasi Ditingkat Desa.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.